

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN DANA DESA DI DESA
GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HILIR
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Hamdani

NIM: 0103163052



**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN DANA DESA DI DESA**

GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HILIR

KABUPATEN DELI SERDANG

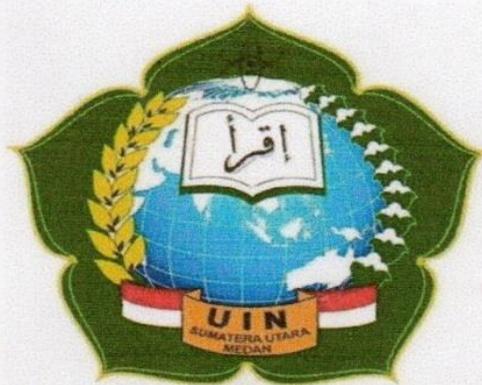
SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Hamdani

NIM: 0103163052



Pembimbing I

Dr. Nispul Khoiri, M. Ag.

NIP. 197204062007011047

Pembimbing II

Dr. Mailin, MA

NIP. 197709072007102004

*See la Pembimbing I
No. 09-07-200*

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Nomor : Istimewa
Lamp :
Hal : Skripsi
An. Hamdani

Medan, Agustus 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN- Sumut
Di- Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Irfan S Berutu yang berjudul: "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberyaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa Di Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. Nipul Khoiri, M. Ag

NIP. 197204062007011047

Pembimbing II

Dr. Mailin, MA

NIP. 197709072007102004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani

Nim : 0103163052

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bara, 20 Januari 1996

Program Study : Pengembangan Masyarakat Islam

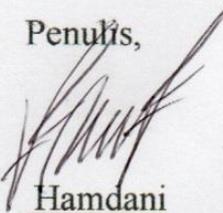
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa Di Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2020

Penulis,


Hamdani

NIM.0103163052

ABSTRAK

Nama : Hamdani
NIM : 0103163052
Fakultas/Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi/Pengembangan
Masyarakat Islam
Pembimbing I : Dr. Nispul Khoiri, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mailin, MA
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa Di Desa
Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten
Deli Serdang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang diberikan oleh Pemerintah desa terhadap masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gunung Rintih Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, metode analisis data yaitu deskriptif. Sumber data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan mengambil data yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan program Pemerintah Desa dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Gunung Rintih.

Hasil yang diperoleh adalah dengan berjalannya program dan kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Desa dapat memberikan perhatian dalam meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam ekonomi Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa peneliti ungkapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman. Atas segala keridhoan Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah, hingga kekuatan-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Di Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang” ini akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

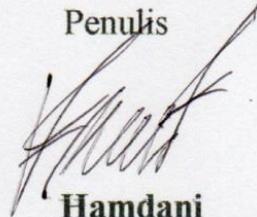
1. Kedua orang tua, yakni Abdul Halim dan Salmah yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam setiap aktivitas, serta atas doa restu yang selalu mengiringi.
2. Abang, Kakak dan Adik-adik peneliti yang selalu memberikan semangat yang menghibur terutama saat peneliti berada dalam titik jenuh.
3. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Kepala Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

5. Bapak Dr. Nispul Khoiri, M.Ag dan Ibu Dr. Mailin, MA selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, pengarahan, saran, serta dukungan yang sangat berarti kepada peneliti.
6. Bapak Neken Andreas Tarigan selaku Kepala Desa Desa Gunung Rintih.
7. Ibu Sri Ulina Sekar Selaku Sekretaris Desa Gunung Rintih.
8. Perangkat Desa Gunung Rintih, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta seluruh masyarakat Desa Gunung Rintih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2016: Ahmad Arsyad, Fauzi, Irfan S Berutu, Fuji Lestari, Raya Hayani, Atika Putri, dan semuanya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, atas persahabatan yang hangat dan semoga selalu hangat.
10. Teman-teman KKN Kelompok 114, atas pelajaran dan kebersamaannya yang singkat namun berkesan.
11. Teman-teman sepermainan yang telah memberikan banyak inspirasi, khususnya Nikmat Salim yang telah meluangkan waktunya memperbaiki komputer rusak saat proses penulisan skripsi.
12. Teman-teman di HMJ PMI, atas kesempatan belajar yang luar biasa.

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Medan, 04 April 2020

Penulis



Hamdani

010316352

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana	11
1) Pengertian Pemerintah Desa	14
2) Dana Desa	17
3) Regulasi Pemerintah Desa	19
4) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	21
5) Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	24
6) Pendekatan-pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	26
7) Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	28
8) Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	29
C. Kajian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Informan penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Kondisi Geografis	42
B. Kondisi demografis	43
C. Sosial Budaya.....	44
D. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa.....	45
E. Program-program Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	51
F. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
Daftar Riwayat Hidup	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Dokumentasi	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membina terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat menegembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakordinir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.¹

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang

¹Chabibsholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2015). Hlm. 54.

tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai UU Desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa di transfer berupa alokasi dana desa; Bagian dari hasil pajak dan *retribusi* Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya membuat desa menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri. Karena mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam mensejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan, maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional.

Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Mengurus keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan *realisasi* Pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban *realisasi* pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan penata usahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Untuk tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk memadai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk memadai keseluruhan penyelenggaran kewenangan desa yang mencakup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan Untuk mendanai kewenangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi :

- a. Kewenangan berskala asal usul

- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk 2 peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, terjadi secara berangsur-angsur dan saling berkaitan, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual.

Pembangunan tersebut perlu adanya kebijakan yang mengendalikan suatu proses, agar tidak terjadinya penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang desa yang telah dijelaskan pada sebelumnya membuat desa menjadi suatu

badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa atau sekelompoknya sendiri. Karena mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting dalam mensejahterakan desa, membuat desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai kesuksesan masalah yang ada, serta program dari pemerintahan, maka dari itu pembangunan desa menjadi sasaran utama pemerintah dalam pembangunan nasional.

Selain itu, melalui program dana desa ini Pemerintah Desa Gunung Rintih melalui bidang pemberdayaan masyarakat mengadakan suatu kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan hasil pendapatan mereka, yakni melalui penataan dan relokasi rasana dan prasana untuk tempat masyarakat memasarkan hasil jualannya. Hal ini dimaksudkan agar adanya penataan dan relokasi, diharapkan sarana dan prasara desa tersebut dapat menjadi lebih nyaman, bersih, meningkatkan lebih banyak konsumen guana meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat sangat berharap selalu ada dilaksakannya program pembangunan maupun program lainnya yang dirasa dapat bermanfaat, berfungsi serta berguna bagi masyarakat untuk menambah mata pencaharian dan tidak kalah pentingnya bisa membantu masyarakat dalam memberdayakan ekonomi.

Oleh karena itu, dengan adanya program dana desa harus diajikan sebagai sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam pelaksanaanya diperlukan semua pihak, terutama bagaimana peran dari kepala desa serta aparatur Pemerintah Desa

mampu mengalokasikan dana desa ini secara tepat sasaran bagi pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut, Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta menimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa ”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah Desa memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gunung Rintih, Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja program Pemerintah Desa Memberdayakan Ekonomi Masyarakat?
3. Apa Saja hambatan Pemerintah Desa Memberdayaan Ekonomi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana pemerintah Desa Memberdayaan Ekonomi Masyarakat.

2. Untuk mengetahui apa saja program Pemerintah Desa memberdayakan Ekonomi Masyarakat.
3. Untuk mengetahui Apa Saja hambatan Pemerintah Desa Memberdayakan Ekonomi Masyarakat.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variannya. Oleh sebab itu, penulis membatasinya:

1. Kata peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melsetarikan kehidupan masyarakat.²
2. Pemerintah Desa adalah suatu lembaga dengan semua aktifitas yang berjalan dalam sistem pemerintahan suatu daerah yang dikepalai oleh kepala desa dan berbagai struktur terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kebijakan tersendiri yang dikatakan otonomi daerah dan tidak menyalahi peraturan undang-undang dari pusat.³
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah dapat menghasilkan suatu kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan

²Narwoko, Sosiologi dan Tekspengantardan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 160.

³Inu kencana safie, Ilmu Perintahan, (Jakarta: Bumi Akasra, 2017), hlm. 8.

setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi suatu yang diidealkan.⁴

4. Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat.⁵

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang social melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan konstribusipemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupunmahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebihmendalam mengenai kinerja Pemerintah Desa Dalam PemberdayaanEkonomi Masyarakat melaluiAnggaran Dana Desa
2. Secara praktis

⁴Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 1.

⁵Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 2.

- a. Bagi Pemerintah Desa , diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- b. Bagi penulis, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penggunaan Anggaran Dana Desa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam tiga bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang ditulis secara sistematis agar dapat memberi pemahaman dan mudah untuk dimengerti.

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pembahasan landasan teori terdiri dari pengertian peran, pengertian pemberdayaan dan pengertian anak jalanan.

BAB III: Metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Kata “ Pemerintahan ” dan kata “ pemerintah” memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “ organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “ Organ” atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khususnya hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UU 1945, pemerintah ialah Presiden, wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan.⁶

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

⁶CST Kansil, Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta Aksara,2009), hlm. 87.

kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

Menurut parmen no 113 tahun 2014 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.⁸

Untuk sekedar mendapat gambaran lebih banyak tentang susunan Organisasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1979 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan menteri dalam Negeri No.1 tahun 1981. Tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan perangkat Desa yang dalam garis-garis besarnya dapat dilihat sebagai berikut.

a. Susunan pemerintah Desa terdiri dari:

1. Kepala Desa.
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
3. Perangkat Desa

b. Susunan LMD terdiri dari:

1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Anggota (minimal 9 orang, maksimal 15 orang tidak termasuk ketua dan sekretaris).

c. Perangkat Desa terdiri dari:

⁷Natairawan, Tata kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 15.

⁸WiratnaSujarweni, akutansi Desa, hlm. 1-2.

1. Sekretaris desa
2. Kepala-kepala Dusun.

d. Sekerretaris desa terdiri dari:

1. Sekretaris desa
2. Kepala-kepala urusan (minimal 3 kepala urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Umum. Maksimal 5 kepala urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan; Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Umum).

e. Kedudukan, tugas dan fungsi kepala Desa dalam garis besarnya sebagi berikut:

1. Kepala Desa adalah alat Pemerintah Pusat, alat pemerintah Daerah dan alat pemerintah desa.
2. Menjalankan urusan rumah tangga desa.
3. Menjalankan urusan pemrintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaran pemerintah desa.
4. Membina ketenteraman dan ketertiban di desa.
5. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat desa.
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pekerjaan kepada Bupati kepala Daerah melalui Camat.
7. Memberikan keterangan pertanggung jawaban minimal satu kali dalam setahun kepada LMD.⁹

⁹K. WantjikSaleh, UU RI No. 5 tahun 1979 tentangpemerintahanDesa, (Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 60.

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Desa, menggariskan bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa). Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari atas sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Selanjutnya dalam pasal 15 ditegaskan, bahwa sekretariat desa terdiri atas sekretaris dan kepala-kepala urusan.¹⁰

Menurut etimologi, desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹¹

Desa sudah ada sebelum Hindia Belanda masuk ke Indonesia, Cornelis Van Vollenhoven di dalam bukunya “Staatsrecht Overzee” mengatakan bahwa sebelum Belanda masuk ke Indonesia telah ada desa yang dinamakan dengan “lembaga-lembaga pengatur masyarakat dan pemerintahan seperti kesatuan perkampungan, kerajaan-kerajaan dan malah republik-republik. Republik-republik yang dimaksud adalah suatu pemerintahan demokrasi yang mementingkan

¹⁰Harry Waluyo, strategi adaptasi masyarakat terhadap program pengembangan pariwisata, 1994/1995, hlm. 29.

¹¹Undang-undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan notonomi daerah, hlm.14.

kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat”.¹²

Sementara dalam kamus Bahasa Indonesia, desa berarti sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini negatif ketika diartikan sebagai udik atau dusun yang sebenarnya pada sebuah tempat dan bukan sifat.

Desa atau udik, menurut desfenis “universal”, merupakan sebuah alglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala desa.¹³

Pengertian desa menurut para ahli diungkapkan secara berbeda-beda:

- a. Menurut Bintarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi , sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.¹⁴
- b. Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan Desa sebagai kesatuan hukum tempat tinggal suatu Masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah di bawah camat.
- c. Pj Bourrnen menyatakan bahwa Desa Merupakan salah bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh adanya hukum dan

¹²Ateng Syafrudin, Pergaulan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain Otonomi Desa, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 4-5.

¹³Unang Sunarjdo, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (Bandung : Tarsito, 1984), hlm. 18.

¹⁴Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 241.

kehendak alam lain; dalam tempat tinggal tersebut ada banyak ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.¹⁵

Berdasarkan pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.¹⁶

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.¹⁷

Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan Menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan

¹⁵IcukRanggabawono, OptimalisasiPotensiDesa Di Indonesia, (Jakarta: Pt Grasindo,2019), hlm. 2.

¹⁶Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dari APBN.

¹⁷Undang-undang 6 Tahun 2014 pasal2 Tentang Desa.

secara swakelola dengan menggunakan sumber daya /bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.¹⁸

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

¹⁸Peraturan Menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015

- d) Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APD desa/Perubahan APD desa.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

3. Regulasi Pemerintah Desa

Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.¹⁹

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan

¹⁹Pasal 69 UU Tentang Desa.

Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permasyarakatan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa dalam Pasal 37 – 38 PP No. 43 dan Pasal 15 – 20 Permendesa PD TT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang yang garis besarnya sebagaimana berikut :

- a. Identifikasi dan interisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari Desa. Desa membuat daftar positif (positive list).²⁰
- b. Setelah teridentifikasi dan terinventarisir, dibuatlah daftar kewenangan dengan ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain.
- c. Selanjutnya, Bupati melakukan sosialisai daftar kewenangan kepada desa dilanjutkan penetapan daftar kewenangan.

²⁰Peraturan Pemerintah. PP No. 43 Tahun 2014.

d. Kepala desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

e. Dan kalau dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi, maka hal itu bisa dilakukan dengan mengusulkan lagi ke Bupati.

Dalam tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) sangat-lah penting dan menentukan. Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fundasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan dalam *oxfort English Dictionary* adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua pengertian:

(1) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain).

(2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan dan kemampuan.

Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan petensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka

dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.²¹

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²²

Konsep pemberdayaan muncul karena dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagal mode pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, dan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.²³

Pembahasan konsep Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan manusia. Konsep pembangunan sumber daya manusia dalam konteks makro merupakan keseluruhan proses aktivitas perluasan spektrum pilihan untuk meningkatkan kemampuan manusia, yang didalamnya tercakup sebagai aktivitas, yaitu: pengembangan pendidikan latihan, kesehatan dan gizi, kesempatan dan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas. Konsep pemberdayaan masuk dalam

²¹Anita Fauziah, Pemberdayaan Masyarakat, (Malang 2009), hlm.17

²²Zubaedy, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 24.

²³Kordiyana K. Rangga, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 27.

rumpun konsep pembangunan SDM (PSDM) yang dikaji melalui: tahapan degilatif, organisatoris, dan individu.²⁴

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri.²⁵

Mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan

²⁴Alexander PhukTjilen, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hlm. 3.

²⁵SunaryoGitoputro, PengembangandanPemberdayaanMasyarakat, (Yogyakarta: GrahaIlmu), hlm.30.

produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.²⁶

5. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok miskin agar merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Terdapat beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu:

a. Pemberian bantuan modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha

²⁶Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31.

menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal.²⁷

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di

²⁷Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: alfabeta, 2012), hlm. 63.

kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

6. Pendekatan-pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p, yaitu:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama dan kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan dipinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.²⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak cara yang dilakukan dalam tahap pemberdayaan masyarakat masing-masing tahap tentunya memberikan gambaran bahwa dengan melakukan tahapan tersebut pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan dengan sesuai dengan harapan. Namun dalam tahapan pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah konsistensi dengan tujuan karena terkadang kondisi masyarakat yang tidak selalu sama sewaktu-waktu dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat selain itu tahapan yang penting ada menghindari konflik karena tidak selalu masyarakat bersedia untuk diberdayakan.

7. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pemberdayaan ada kondisi dimana masyarakat secara umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan,

²⁸Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (bandung: PT. Refika Aditama),2005, hlm. 67.

kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.²⁹

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota.
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
6. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai

²⁹Agnes Sunartiningih, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2004, hlm. 140.

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Berdasarkan beberapa poin diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

8. Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna meningkatkan produktifitas rakyat. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Ada banyak sekali manfaat atau sisi positif dengan adanya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat ini. Berikut beberapa poin pentingnya pemberdayaan ekonomi yang harus kita pahami.³⁰

a. Menjadikan masyarakat lebih Mandiri

Perekonomian masyarakat adalah perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat. Perekonomian ini diselenggarakan oleh rakyat dan bersumber dari potensi serta kekuatan masyarakat dalam menjalankan perekonomian mereka sendiri.

Dengan begitu, berarti masyarakat bisa lebih mandiri dalam menentukan arah perekonomiannya sendiri. Mereka yang menentukan apa potensi yang bisa

³⁰ Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora Utama Press), 2001, hlm. 60.

diangkat dan bagaimana untuk menjalankan potensi tersebut. Dengan cara ini pula membuat masyarakat lebih mandiri dalam menjalankan ekonominya sendiri.

b. Membantu usaha menjadikan perekonomian yang besar dan modern

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bertujuan untuk menjadikan ekonomi yang besar, modern, kuat dan memiliki daya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Perekonomian yang duluan berjalan dengan cara tradisional harus didorong untuk berubah menjadi perekonomian modern.

Saat ini perkembangan teknologi semakin maju sehingga memaksa siapa pun untuk ikut arus perubahan zaman. Jika perekonomian masih mengandalkan cara lama (tradisional) maka bersiaplah untuk tergerus dengan zaman dan tidak bisa ikut berkembang.

c. Terjadinya perubahan struktural dalam ekonomi

Perubahan struktural ekonomi yang dimaksud adalah perubahan ekonomi dari sistem tradisional ke sistem ekonomi modern. Dari ekonomi yang bersifat lemah menuju ke ekonomi bersifat kuat dan dari ekonomi subsiten ke ekonomi pasar serta dari ekonomi yang ketergantungan ke ekonomi yang mandiri.

d. Terjalannya Kemitraan Yang Baik

Melakukan pemberdayaan ekonomi tidak hanya cukup dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan yang sama untuk berusaha atau memberikan suntikan modal semata. Namun harus ada kerjasama atau kemitraan yang baik antara yang telah maju dengan yang masih lemah atau yang belum berkembang.

Dengan cara ini antara satu sama lain bisa menguatkan dan memberikan stimulan bagaimana cara menjalankan perekonomian agar kuat dan berkembang. Sehingga antara satu dan lainnya bisa menjaga agar semuanya maju.

e. Mendorong Munculnya Wirausaha Baru

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya semakin mendorong munculnya wirausaha baru. Karena kemudahan yang diberikan dari pemanfaatan modal, sumberdaya manusia dan teknologi yang ada. Antara usaha yang telah maju dan yang masih lemah saling tolong menolong untuk angkit dan berkembang.

f. Penguatan Industri Kecil

Perekonomian masyarakat tidak bisa terlepas dari industri kecil yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Dengan adanya perekonomian masyarakat mampu membantu menguatkan perekonomian industri kecil agar gulung tikar. Karena seperti yang kita tahu bahwa industri kecil sangat lemah jika tidak ada bantuan atau pun pembinaan dari industri yang sudah mapan.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup banyak hal, diantaranya seperti peningkatan akses bantuan untuk modal usaha, peningkatan akses untuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi masyarakat tersebut.

Banyak sekali manfaat yang akan bisa dirasakan dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa ini. Baik untuk para pekerja atau pun para pemilik industri kecil. Ekonomi dalam masyarakat akan terus maju dan bisa bersaing dengan ekonomi lainnya.

C. Kajian Terdahulu

1. M. Indra Maulana (2008) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan “ Peran Dana dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam” hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk membangun suatu desa ekonomi masyarakat adalah suatu penunjang dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan dapat dilakukan dengan baik.

Dalam penulisan proposal yang berkaitan dengan masalah peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa, menurut penelusuran peneliti terdapat karangan ilmiah (Skripsi) yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa di Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang. Oleh Hamdani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang saya teliti lebih menekankan kepada peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Deskriptif Dan Kualitatif

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif-Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa, peneliti memulai penelitiannya dengan mengemukakan teori, mengumpulkan data untuk di uji teori, dan berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, menunjukkan apakah teori ini terkonfirmasi sebagai kajian dari penelitian kualitatif.

Pengambilan data penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive* dan untuk informasi berikutnya ditentukan dengan Teknik *snow ball sampling*. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dilakukan dengan cara: Wawancara, Partisipasi, Studi Dokumentasi/literature.³¹

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam model analisa data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk memenuhi validitas data, dilakukan triangulasi data, dengan cara

³¹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang memungkinkan terjadi.

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa . Pendekatan sosiologi menggunakan logika logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun teori modern untuk menggambarkan fenomena fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lainnya. Pendekatan disini dimaksud adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang pernah dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Anggaran Dana Desa kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan bimbingan terhadap mereka.

B. Informan Penelitian

Didalam suatu penelitian maka kita akan mengenal yang namanya objek dan subjek. Objek penelitian merupakan apa yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan subjek adalah yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Tabel Infoman

No	Nama	Umur	Status	Jabatan
1	Neken Andrea Tarigan	58	Nikah	Kepala Desa
2	Sri Ulina Sekar	47	Nikah	Sekretaris Desa

3	M. Nuh Saragih	54	Nikah	Kepala Dusun 8
4	Syamsir Yus Darma	29	Nikah	Kaur Pembangunan
5	Supriadi	55	Nikah	Palatih Pembuatan Kripik/ Kepala Dusun IV Serasi
6	Rehan Reyna	32	Nikah	Pelatih Menjahit

C. Lokasi Penelitian

Sebelum menentukan lokasi yang akan diteliti ada tiga unsur yang penting yang perlu ditimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, waktu, pelaku, dan kegiatan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di Desa Gunung Rintih Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang pada tgl 09 Juli sampai 27 Agustus 2020, oleh karena itu penulis mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya.³²

D. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan harus menggunakan atau mencari data yang sesuai, maka penulis mengambil data-data untuk kebutuhan penelitian, yaitu: primer dan skunder. Data primer adalah data yang dieperoleh melalui hasil yang pertama, sedangkan data skunder adalah data yang diambil dari sumber kedua.

1. Data Primer

³²S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996.) hlm., 43.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa , Sekertaris desa, dan masyarakat sekitar atau pendatang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

Data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini: berupa buku, majalah, internet serta sumber data yang lain yang dijadikan data pelengkap. Sumber data sekunder dapat di bagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, kajian konseptual yaitu kajian yang artikrl artikel dan buku yang diteliti oleh para ahli. *Kedua*, kajian pustaka dari hasil kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan ini baik yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang baik dalam suatu penelitian adalah yang dapat di percaya kebenarannya , tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang luas untuk dapat menarik kesimpulan. Oleh karena itu data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil penelitian di

lapangan. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan.³³

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain

³³S. Nasution, *Metode Research*, (PT. Ikrar Mandiri Abadi: Jakarta 2001), hlm. 113.

saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, sekretaris desa, kepala dusun, masyarakat sekitar dan masyarakat pendatang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat surat catatan harian, cendra mata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam dan menjadi bahan bukti dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah usaha yang dikerjakan dengan menggunakan data, mengorganisasi data, dan mencermati kemudian dipilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dipelajari kemudian menentukan apa saja yang penting, dan menentukan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa data digambarkan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun tahapan dalam penelitian kali ini, mengelompokkan data yang diperoleh kemudian disederhanakan, hal ini

disesuaikan dengan data yang terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah analisis.³⁴

Data yang disajikan juga berupa jawaban dari permasalahan yang ada, kemudian menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Adapun teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Di mana setelah penulis memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validitasnya. Sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

³⁴Muhammad, Metode Penelitian bahasa, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 233.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis

Secara Administratif, lokasi Penelitian mini riset Skripsi di Desa Gunung Rintih, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara. Desa Gunung Rintih mempunyai luas: \pm 3693 ha (hektar). Jumlah Penduduk total 3.252 orang, terdiri dari Laki-laki 1.602 orang, Perempuan 1.650 orang, dengan jumlah Kepala Keluarga 851 KK. Desa Gunung Rintih terdiri dari 11 dusun yakni:

No.	NAMA	JABATAN
1.	Ngamanken	Kepala Dusun I
2.	Linus Januari Sembiring	Kepala Dusun II
3.	Ngadino	Kepala Dusun III
4.	Supriadi	Kepala Dusun IV
5.	Ade Syahputra	Kepala Dusun V
6.	Ndemi Sitepu	Kepala Dusun VI
7.	Maju Gurusinga	Kepala Dusun VII
8.	M. Nuh Saragih	Kepala Dusun VIII

9.	Antonius Perangin-Angin	Kepala Dusun IX
10.	Ratno	Kepala Dusun X
11.	Dahmin	Kepala Dusun XI

B. Kondisi Demografis

Demografis merupakan keadaan dinamika kependudukan manusia. Dimana demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Adapun data demografis di Desa Gunung Rintih ini adalah:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.602
2.	Perempuan	1.650
	Jumlah	3252

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (sumber: arsip desa)

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.285
2.	Katolik	876
3.	Protestan	902
	Jumlah	3063

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (sumber: KUA)

C. Sosial Budaya

Sosial Budaya merupakan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sosial budaya mengacu pada kehidupan bermasyarakat yang menekankan pada aspek adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Di Desa Gunung Rintih ini terbagi ke dalam 11 dusun. Di desa ini memiliki kegiatan-kegiatan sosial yang dilatar belakangi oleh budaya sukunya dan budaya agamanya serta kondisi lingkungannya. Di Desa Gunung ini juga terdapat beberapa kegiatan sosial, seperti:

1. Kegiatan Sosial Budaya:

- a. Majlis Ta'lim
- b. Wirid Yasin
- c. Gotong Royong
- d. Pengajian

2. Fasilitas Lingkungan:

- a. Sarana Kesehatan
 - Puskesmas : 1
 - Posyandu : 1
- b. Sarana Olahraga
 - Lapangan bola kaki: 1
- c. Sarana Pendidikan
 - SD Negeri : 4
 - TK/PAUD : 1
- d. Sarana Ibadah

Masjid	: 5
Musholah	: 3
Gereja	: 5

3. Organisasi Masyarakat / LSM

- a. PKP
- b. IPK
- c. Organisasi Remaja Masjid
- d. PSM
- e. AMPI

Berdasarkan sosial ekonomi masyarakat setempat mayoritas pekerjaannya adalah bertani, berternak, dan usaha rumahan.³⁵

D. Peran Pemerintah Desa Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Adapun Peran dari Pemerintah Desa Gunung Rintih dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Gunung Rintih dengan

³⁵Hasil Wawancara Dengan Sri Ulina Sekar, Sekretaris Desa, Hari Senin 20 juli 2020.

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).
4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁶

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program

Pemerintah Desa Gunung Rintih sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari kepala dusun, kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMD, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Pemerintah Desa.

Peran utama Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada masyarakat bawah,dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Gunung Rintih bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa gunung rintih untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Neken Andreas Tarigan, Kepala Desa, Hari Senin 20 Juli 2020.

kegiatan yang ada dilapangan. Berikut program-program pembangunan masyarakat Desa Gunung Rintih pada periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan Kelembagaan UPK
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kerja bakti
 - b. Musrenbang desa
 - c. Pembangunan Fisik
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan menjahit
 - b. Pelatihan pembuatan kripik
 - c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Pemerintah Desa Gunung Rintih mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa gunung rintih mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari pemerintah desa gunung rintih dalam meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Rintih secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bidang ekonomi

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Gunung Rintih bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam sawit, jambu kristal, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin babat dan mesin semprot tanaman. Sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat desa Gunung Rintih sering mengalami masalah dalam bercocok tanam.

Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa Gunung Rintih selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit yang baik pada saat musim rendengan (masa bercocok tanam pada saat musim hujan) maupun ketigo (musim panas atau musim kering), petani desa Gunung Rintih juga diberikan bantuan murah melalui Gapoktan (Golongan kelompok Tani), dalam hal ini petani yang ada didesa Gunung Rintih diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkriditan rakyat yang dikelola oleh UPK Amanah yang ada didesa Gunung Rintih sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian.³⁷

2. Pembinaan dalam bidang kesehatan

Kegiatan posyandu yang ada didesa Gunung Rintih berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di 6 posyandu ditiap dusun sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 2 bulan sekali hal ini dikarena posyandu lansia hanya berjumlah 1 tepatnya di dusun 1 . Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak

³⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsir Yus Darma, Kaur Pembangunan, hari Jum'at 07 Agustus 2020

manfaat bagi kaum ibu-ibu, lansia wanita serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

3. Pembinaan dalam bidang keagamaan

Pemerintah Desa Gunung Rintih bersama LPMD melakukan pembinaan kepada masyarakat desa Gunung Rintih melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah yasinan. kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali masyarakat desa Gunung Rintih bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga desa, selain itu juga pemerintah desa akan dengan mudah untuk membina serta mengkoordinir kegiatan keagamaan untuk menunjang Kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah masyarakat desa maka Pemerintah Desa Gunung Rintih memberikan bantuan-bantuan baik berupa dana atau tenaga untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah seperti: renovasi mushollah yang ada di dusun , renovasi mushollah yang ada di dusun lau mantin, renovasi masjid Al-Ikhlas yang ada di dusun sudomuncul, renovasi masjid yang silaturrahim ada di dusun serasi.

4. Pembinaan dalam bidang kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Rintih melalui Sosialisasi tentang bahaya narkoba, kegiatan tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali, dimana kegiatan sosialisasi tersebut Pemerintah Desa Gunung Rintih bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat desa Gunung Rintih bisa lebih

berhati-hati, mencegah serta bisa memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan desa Gunung Rintih.³⁸

5. Pembinaan dalam bidang pendidikan

Pemerintah Desa Gunung Rintih melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal (Kelas) PAUD Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan selain itu Pemerintah Desa Gunung Rintih dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya. akan tetapi jika masyarakat tersebut tergolong menengah keatas pemerintah desa memunggut biaya sebesar Rp. 7.000.³⁹

6. Pembinaan dalam bidang keamanan

Pemerintah desa dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang keamanan terbukti dengan diadakannya kegiatan siskamling setiap hari. dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan menggati dihari berikutnya. Sebelum diadakannya kegiatan siskamling kondisi keamanan desa Gunung Rintih diwarnai dengan banyaknya kejahatan salah satunya dengan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor warga serta penjambretan yang pernah terjadi di dusun Krajan. maka dari itu pemerintah Desa Gunung Rintih

³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan Harahap, Ketua Bkm Masjid Al-Ikhlas, Hari Jum'at 07 Agustus 2020.

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Agustorus Tarigan, Kaur Pemerintahan, Hari Senin 20 Juli 2020.

mengadakan kegiatan siskamling secara bergiliran sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Desa Gunung Rintih.

E. Program-Program Pemerintah Desa Dalam Perberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program-program yang ada pada Pemerintahan Desa Gunung Rintih, ialah sebagai berikut:

a. Pengaktifan Kelembagaan UPK

Pemerintah desa Gunung Rintih memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK Amanah, dimana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa. dengan aktifnya lembaga UPK Amanah yang ada di desa Gunung Rintih masyarakat desa Gunung Rintih tidak perlu repot-repot meminjam modal ketempat lain.

Pemberian pinjaman modal dari UPK Amanah dengan bunga yang rendah akan memudahkan masyarakat desa Gunung Rintih dalam melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha sebelum aktifnya lembaga UPK Amanah kebanyakan dari masyarakat desa melakukan peminjaman ke reternir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari UPK Amanah sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha.⁴⁰

b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pemerintah Desa Gunung Rintih , dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerja Bakti

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Ulina Sekar, Sekretaris Desa, Hari Senin 20 Juli 2020.

Pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Gunung Rintih dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya hari minggu. sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan Kepala dusun, BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

2. Musrenbangdes

Desa Gunung Rintih menetapkan program-program Pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, ketua LPMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun.

3. Pembangunan Fisik

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gunung Rintih sumber pembiayaannya sebagian berasal dari pemerintah pusat yang melalui PNPM, sebagian lagi berasal dari pemerintah desa yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat desa. Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, irigasi, perbaikan jembatan, dll. Dalam pembangunan fisik pemerintah Desa

Gunung Rintih bekerjasama dengan ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD dan Kaur Pembangunan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

c. Peningkatan Ekonomi Produktif

Untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Gunung Rintih mengalami banyak kendala seperti keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM maka pemerintah desa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Gunung Rintih adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Menjahit

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberian pelatihan salah satunya dengan pelatihan menjahit pembuatan yang bekerjasama dengan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Deli Serdang dalam memberikan pelatihan tentang pembuatan baju dengan baik serta bisa meningkatkan kualitas serta model-model yang bisa meningkatkan harga jual masyarakat.

Dengan kegiatan pemberian pelatihan dan peningkatan model-model desain pembuatan baju yang ada di Desa Gunung Rintih berjalan dengan baik hal ini tunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengrajin pada tahun 2017 berjumlah 2 orang dan pada tahun 2019 jumlah pengrajin menjadi 12 orang selain

itu Pemerintah Desa Gunung Rintih memberikan kemudahan kepada pengerajin Menjahit dengan memasarkan hasil produksinya melalui UPK Amanah serta bazar-bazar maupun pameran ditingkat Kabupaten.⁴¹

2. Pelatihan Pembuatan Kripik

Salah satu produk yang memperhatikan budaya lokal dan bahan baku lokal adalah produk olahan dari Singkong. Singkong merupakan salah satu bahan makan pokok masyarakat Indonesia selain padi dan sagu. Rasanya yang enak dan sangat mengenyangkan membuatnya menjadi bahan makanan pokok yang baik. Dipilihnya singkong juga sangat tepat mengingat manfaat dan kegunaan singkong cukup banyak.

Singkong merupakan salah satu tanaman yang paling strategis untuk ditanam di daerah tropis seperti Desa Gunung Rintih dusun IV Serasi. Hasil singkong di dusun Serasi cukup banyak karena sebagian masyarakat di dusun Serasi bertani Singkong. Melimpahnya hasil singkong masyarakat di Desa Gunung Dusun IV Serasi tidak dibarengi pemahaman masyarakat yang mampu menciptakan nilai tambah produk olahan singkong agar mampu menciptakan peluang bisnis, maka diharapkan ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang kewirausahaan dan nilai tambah suatu produk pertanian, terbentuknya jaringan pasar kripik singkong dan adanya peningkatan ekonomi masyarakat.⁴²

Tujuan kegiatan pelatihan pembuatan kripik ini adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan yang mampu

⁴¹Hasil Wawancara dengan Ibu Rehan Reyna, Pelatih Menjahit, Hari Selasa 02 September 2020.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi, Pelatih Pembuatan Kripik dan Sekaligus Kepala dusun IV Serasi, 02 September 2020.

mengolah hasil pertanian singkong menjadi produk olahan yang bernilai tambah. Selain itu kegiatan ini mampu memberikan motivasi dan dorongan agar masyarakat mampu berwirausaha secara inovatif sehingga mampu bersaing melalui kegiatan pelatihan dan seminar kewirausahaan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Gunung Rintih dalam memberdayakan masyarakat desa gunung rintih yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Kerjasama Pemerintah Desa,

Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Gunung Rintih dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat desa Gunung Rintih.

Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari Pemerintah Desa Gunung Rintih yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat desa Gunung Rintih sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan

pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

2. Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Gunung Rintih. Dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Gunung Rintih cepat terealisasi. salah satunya pembangunan drainase (Pembuatan Paret untuk pengaliran air) yang ada didusun 9 Sarang Kulit yang mana sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 2.100.00,00 dan sebagian dana berasal dari swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 900.00,00 dengan adanya dana tersebut maka pembangunan sarana drainase yang ada didusun Sarang Kulit cepat terealisasikan dan sesuai dengan terget penyelesaian.⁴³

b. Faktor Penghambat

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Desa Gunung Rintih tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat Gunung Rintih yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat.

2. Budaya Malas

Pemerintah Desa Gunung Rintih telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan

⁴³Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Ulina Sekar, Sekretaris Desa, Hari Senin 20 Juli 2020.

menjahit. dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan tentang cara mendesain, memadukan benang, manajemen pemasaran produksi serta pemotongan busana akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa mempraktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami di kebun.

3. Ketersediaan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, Proyektor, serta ketersediaanya tempat duduk yang tidak memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Gunung Rintih menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan.

G. Analisis Penulis

Pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Rintih sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan Infrastruktur di Desa gunung Rintih berjalan begitu masif. Hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh Desa Gunung Rintih. Pembangunan tersebut berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilisasi seperti jalan ataupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan juga dilaksanakan dalam bidang yang lain seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Gunung Rintih telah menjalankan perannya dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui, Pertama sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: Pengaktifan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) “Amanah”, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan ekonomi produktif. Kedua sebagai pelaksana kebijakan, Ketiga sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang keamanan serta bidang kepemudaan. Melalui program-program tersebut Pemerintah Desa Gunung Rintih bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa .

2. Pemerintah Desa Gunung Rintih mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Gunung Rintih. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Gunung Rintih yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir serta kurangnya fasilitas dalam menunjang

kelancaran kegiatan yang ada di desa hal ini menyebabkan program-program pemberdayaan menjadi terhambat.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di Desa Gunung Rintih melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat terlebih dahulu dengan sosialisasi untuk menmbuhkan motivasi masyarakat, lalu dilakukan dengan membangun penguatan kapasitas bagi para pelaku usaha ekonomi yang ada di desa gunung rintih untuk diberikan pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memberikan pendanaan berupa dana atau modal kepada masyarakat yang terbagi dalam kelompok kecil masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing.

4. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat lokal yaitu:

a. Pengembangan sumber daya manusia, dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan pemberian bekal pengetahuan bagi masyarakat lokal Desa Gunung Rintih.

b. Pemupukan modal masyarakat, pemerintah desa berusaha memberikan modal bagi masyarakat untuk pengembangan usaha yang dapat menunjang perkembangan desa wisata.

c. Pengembangan usaha produktif, masyarakat di Desa Gunung Rintih diarahkan untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan tujuan agar tercapai kesejahteraan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Instansi (Pemerintah)

Pemerintah harus memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat pedesaan agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke daerah pedesaan, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan dalam melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat setempat maupun masyarakat yang ada di luar Gunung Rintih, harus meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Desa maupun Lembaga Lainnya agar ekonomi rumah tangga juga dapat meningkat dan mendapatkan kesempatan kerja.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini semoga peneliti mampu untuk ikut menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga suatu saat dapat melakukan strategi pemberdayaan untuk mencapai keberhasilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Hamdani
Nim : 0103163052
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat
Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bara, 20 Januari 1996
Alamat : Jl. Amaliun gg. Bandung No. 8

Latar Belakang Pendidikan

SD : SDN 2 Rimo
SMP : Smp Darul Muta'allimin Tanah Merah
SMA : MAS Darul Muta'allimin Tanah Merah
Kuliah : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, 1991, Ilmu Dasar Sosial, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Bawono, IckurRangga, 2019, Optimalisasi PotensiDesa di Inonseia, Jakarta: Pt Grasindo.
- Cst Kansil, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Aksara.
- Dimas Jumal, 2012, Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, Semarang: LPM IAIN Walisongo.
- Fauziah Anita, 2009, PemberdayaanMasyarakat, Malang.
- Gitoputro Sunaryo, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Irawan Nata, 2017, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Jakarta: YayasanPustakaObor Indonesia.
- Hikmat Harry, 2001, Strategi pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press.
- J. Maleong Lexy, 1995, MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- K. Rangga Kordiyana, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Mardikanto, 2012, Pemberdayan Masyarakat, Bandung: Alfabeta.
- Martono Nanang, 2011, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muin Idianto, 2016, Sosiologi Jilid 3, Jakarta: Erlangga.
- Narwoko, 2014, Sosiologi dan Teks pengantar danTerapan, Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad, 2016, PerspektifPerubahanSosial, Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh K. Wantjik, 1990, UU RI No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia.
- Sholeh Chabib, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: Fokus Media.
- S. Nasution, 2001, *Metode Reseaarch*, Jakarta: PT BumiAksara.
- S. Naution, 1996, *Metode NaturalistikKualitatif*, Bandung: Tarsinto. Bandung: PT Refika Aditama.

- Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunartiningsih Agnes, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Sujarweni wiratna, *Akutansi Desa*.
- Sunarjdo Unang, 1984, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito.
- Syafrudin Ateng, 2010, *Pergaulan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni.
- Syalim, 2015, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: CitaPustaka Media.
- Syani Abdul, 2015, *Sosiologi Skematika Teori dan Terepan*, Jakarta BumiAksara.
- Tjilen Alexander Phuk, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Undang-undang 6 Tahun 2014 pasal 2 Tentang Desa.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan otonomi daerah.
- Usman Sunyoto, 2010, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015.
- Pasal 69 UU Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah. PP No. 43 Tahun 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wayulo Harry, 1994/1995, *strategi adaptasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata*.
- Wibowo, 2016, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zubaedy, 2013, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenna Media Group.

Dokumentasi









